

The Empowerment Strategy On Fishermen Community In Pondok Kelapa Village, Pondok Kelapa Subdistrict, Bengkulu Tengah District, Bengkulu Province

Strategi Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Nelayan Di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu

Azuwandri¹⁾, Gustini²⁾
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
Email: azuwandri24@gmail.com¹⁾; stia_gustini@yahoo.com²⁾

How to Cite :

Azuwandri, A. Gustini, G. (2024). The Empowerment Strategy On Fishermen Community In Pondok Kelapa Village, Pondok Kelapa Subdistrict, Bengkulu Tengah District, Bengkulu Province. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v5i1>

ARTICLE HISTORY

Received [15 Februari 2023]
Revised [18 September 2023]
Accepted [22 Desember 2023]

KEYWORDS

Fishermen, Poverty, Strategy, Swot Analysis.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Desa Pondok Kelapa merupakan salah satu desa di Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki pantai yang kaya dengan potensi sumberdaya perikanan laut. Sebagian masyarakat Desa Pondok Kelapa bermukim di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil laut kehidupannyamasih dibawah garis kemiskinan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan terhadap nelayan ini, salah satunya adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan dan merumuskan strategi kebijakan dalam rangka pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode diskriptif. Sampel (responden) penelitian yang diambil adalah 30 (tiga puluh) responden, 5(lima) responden berasal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah (satu responden dari Dinas Kelautan dan Perikanan, satu renponden dari Kecamatan Pondok Kelapa, satu responden dari Kantor Desa Pondok Kelapa, satu responden dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan satu responden dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan 25 (dua puluh lima) responden terdiri dari nelayan, pedagang (pedagang), dan istri nelayan (pedagang). Metode analisis yang digunakan yaitu: (1). Analisis deskriptif, untuk menilai/menggambarkan faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi terhadap masyarakat dilokasi penelitian, (2). Analisis SWOT, untuk merumuskan strategi pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial adalah tingkat pendidikan responden rendah menyebabkan produktivitasnya rendah, jumlah tanggungan keluarga responden cukup besar, dan faktor alam yang tak bias diprediksi menjadikan responden tidak dapat melaut sepanjang waktu, aspek ekonomi nelayan dipengaruhi pendapatan yang didapat hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan aspek kelembagaan responden cukup berminat bergabung dalam organisasi dan kelompok yang menjadi kendala mereka adalah terbatasnya pengetahuan dan kurangnya pembinaan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh lima strategi pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di Desa Pondok Kelapa yaitu: (1). Pengembangan teknologi usaha perikanan, (2). Pengembangan penguasaan teknologi tepat guna, (3). Mengembangkan deversifikasi usaha perikanan, (4).

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan dan (5). Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan dengan cara meminimalisir faktor penyebab timbulnya kemiskinan masyarakat nelayan tersebut. Sehingga apabila pengentasan kemiskinan dilakukan sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat dan faktor-faktor penyebabnya masing-masing, maka upaya pemberdayaan nelayan tersebut dapat lebih optimal.

ABSTRACT

The purposes of this study is to identify factors that affect the emerging of poverty and to formulate policy strategies in empowering fishermen communities in the village of Pondok Kelapa, Pondok Kelapa subdistrict, Bengkulu Tengah regency. This research was case study using descriptive methods. The number of sample (respondent) of the study was 30 (thirty) individuals, 5 (five) were from the regional work units of Bengkulu Tengah regency and 25 (twenty five) consisted of fishermen, traders (middlemen), and the fisherman's wives (traders). The methods of analysis used in this study were: (1) descriptive analysis used to describe the causes of poverty happening to the people in the study sites, and (2) SWOT analysis used to formulate strategies on empowerment of fishermen communities at the sites. Results of the study show that the identified social aspects were: the low education of respondents, the large number of family members that must be defrayed, and the unpredictable natural factors. In economic aspect, it was found that fishermen were affected by the fish catches and inadequate income. Whereas in the institutional aspect, it was found that respondents were enthusiastic to join the group, but the problem were as the knowledge and guidance was low. From the SWOT analysis, it was obtained five strategies to empower the fishermen community, namely: (1). Development of fisheries technology, (2). Development of appropriate technologies mastery, (3). Development of fisheries diversification, (4). Building of facilities and infrastructures for fishery business, and (5). Institutional reinforcement of coastal communities.

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat nelayan sebagian besar terfokus pada aspek sosial dan aspek ekonomi, serta aspek kelembagaan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan tradisional merupakan kelompok sosial yang didalamnya termasuk kelompok masyarakat yang miskin. Kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan merupakan sumber yang membuat masyarakat lemah dalam keikutsertaannya membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan mereka, oleh sebab itu kemiskinan masyarakat pesisir menjadi isu sentral dalam pembangunan kawasan pesisir (Kusnadi, 2007).

Indonesia sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan pesisir pantai yang memiliki potensi laut yang besar, dan potensi ini bila tergali secara baik tentunya akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada potensi perikanan laut. Tetapi kenyataan yang ada masyarakat nelayan senantiasa didera oleh kemiskinan yang begitu besar, bahkan boleh dibilang nelayan adalah identik dengan kehidupan orang miskin, tingkat kesejahteraan nelayan pada saat ini masih dibawah sektor-sektor lain termasuk sektor pertanian. Nelayan (buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang tergolong lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain disektor pertanian.

Kesulitan masyarakat kelompok nelayan ini untuk keluar dari kemiskinan karena mereka dibatasi oleh beberapa hal khususnya bidang sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar dan modal. Menurut Kusnadi (2009) kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat pesisir sampai saat ini belum dilakukan secara optimal dalam

upaya pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat nelayan tersebut. Pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat setempat menjadi kekuatan modal sosial dan terbukti dapat mengurangi sikap selfish dan free rider dan akhirnya lebih mendorong pemanfaatan sumberdaya yang sustainable. Departemen Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai program pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat seperti program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) dan P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Pedesaan).

Tetapi sampai pada saat ini masyarakat kelompok nelayan tradisional masih hidup dalam kekurangan dan kemiskinan yang sangat membutuhkan perhatian dan uluran tangan pihak luar dari mereka untuk dapat memberikan kekuatan dan memberdayakan mereka agar masyarakat kelompok nelayan tersebut dapat keluar dari kemiskinannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menerima beras miskin termasuk didalamnya kelompok nelayan tradisional yang digelontorkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kebutuhan pangan, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penerima Raskin diKecamatan Dalam Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah KK
1.	Taba Penanjung	2.765
2.	Karang Tinggi	3.859
3.	Talang Empat	2.501
4.	Pondok Kelapa	3.847
5.	Pagar Jati	2.359
6.	Pematang Tiga	1.842
7.	Merigi Kelindang	2.129
8.	Pondok Kubang	1.974
9.	Bang Haji	1.756
10.	Merigi Sakti	3.133
Jumlah		26.165

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020

Menurut Kusnadi (2007) kemiskinan yang terjadi pada nelayan lebih banyak disebabkan oleh banyaknya permasalahan seperti: masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan keluarga, hasil tangkapan yang sedikit karena disebabkan sistem bagi hasil yang tidak adil antara pemilik perahu dan nelayan, saat musim badai nelayan tidak bisa melaut menyebabkan pendapatan mereka turun karena tidak ada usaha lain, keterampilan yang mereka miliki hanya melaut atau menjadi buruh bangunan, alat tangkap yang sederhana dan motor perahu kecil sehingga jelajah kapal terbatas, penjualan hasil tangkapan murah karena harga ditentukan pedagang dan juragan, kesulitan mendapatkan modal untuk melaut atau keperluan lain bagi keluarganya dan kesulitan mereka memperoleh modal dari lembaga keuangan atau bank sehingga memaksa mereka meminjam pada renternir atau juragan dengan bunga tinggi.

Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tradisional adalah akibat dari produktivitas mereka yang rendah, yang mengakibatkan turunnya perolehan pendapatan mereka, ditambah dengan pergantian musim yang ekstrim yang membuat nelayan tidak dapat melaut, keadaan nelayan yang demikian tentunya harus menjadi perhatian yang serius. Jika kemiskinan yang dialami oleh masyarakat kelompok nelayan tradisional ini tidak ditangani dengan baik maka akan dapat

berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat juga dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan masyarakat pesisir.

Berkaitan dengan permasalahan yang dijelaskan seperti tersebut di atas juga dialami oleh masyarakat nelayan yang berada di Desa Pondok Kelapa, yang ditunjukkan dengan keadaan tempat tinggal kurang layak, kawasan permukiman yang kumuh dan kurangnya prasarana dasar yang harus dimiliki sebagai kebutuhan dasar manusia. Seperti tersebut di atas ada beberapa program pemerintah telah dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat kelompok nelayan umumnya termasuk kelompok nelayan Desa Pondok Kelapa, namun masih saja mereka terperangkap dalam kemiskinannya, maka berdasarkan fenomena seperti tersebut sangat menarik untuk dijadikan penelitian, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian berbagai permasalahan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat pesisir nelayan Desa Pondok Kelapa dan kemudian menjawab permasalahan tersebut.

LANDASAN TEORI

Masyarakat Nelayan

Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem masyarakat nelayan terdiri atas kategori kategori sosial yang membentuk satu kesatuan sosial, mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai representasi perilaku sehari-hari.

Menurut Kusnadi (2006) sebagian besar masyarakat pesisir baik langsung atau tidak menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan, seperti masyarakat lain masyarakat nelayan juga menghadapi sejumlah masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan ekonomi;
2. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha;
3. Kelemahan fungsi lembaga sosial ekonomi yang ada;
4. Kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik;
5. Degradasi sumberdaya lingkungan: pesisir dan laut atau pulau-pulau kecil;
6. Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Masalah-masalah tersebut saling berkaitan misalnya masalah kemiskinan ini disebabkan oleh hubungan korelasi antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum berfungsi, kualitas SDM rendah, degradasi sumberdaya lingkungan dan kebijakan yang belum berpihak pada kemaritiman, atau juga karena sebaliknya.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah teori, fakta dan kebijakan bahkan masalah yang sudah sejak lama ada dan hampir dapat dikatakan akan tetap menjadi "kenyataan abadi". Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang cukup penting dalam pembahasan pembangunan. Pengertian kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat dkk (1999) adalah sebuah konsep ilmiah yang lahir sebagai dampak ikutan dari pembangunan dalam kehidupan. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Kemiskinan merupakan suatu kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Karena standar hidup manusia itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang dapat diterima secara umum. Kemiskinan

adalah juga ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas. Kemiskinan dapat dilukiskan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Salim, 1984). Dalam kaitannya dengan hal ini, *World Bank* mendefinisikan keadaan miskin sebagai:

"Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society" (World Bank, 1990).

Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kebutuhan tersebut hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga miskin.

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan selalu dikaitkan dengan sesuatu kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan individu dan sosial. Menurut Hikmat (2006), pemberdayaan diartikan pemahaman secara psikologis yaitu: pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial serta kekuatan politik dan hak haknya menurut undang undang.

Menurut McArdle (1989), pemberdayaan suatu proses pengambilan keputusan oleh orang yang konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai kemandirian secara bersama senantiasa harus diberdayakan, juga termasuk usaha-usahanya, ilmu pengetahuannya serta sumberdaya lainnya yang menunjang mereka dalam rangka mencapai kemandirian tanpa ketergantungan pada pihak lain.

Menurut Suharto (2005), pemberdayaan merujuk pada kemampuan individu dan kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk; 1). Memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka mempunyai kebebasan mengemukakan pendapat, kelaparan, kebodohan dan sakit; 2). Mempunyai kemampuan menjangkau sumber sumber produktif sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memungkinkan mereka memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan; 3). Mereka dapat berpartisipasi dalam membangun dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib mereka.

Pemberdayaan merupakan proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok masyarakat lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan pemberdayaan merupakan rujukan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, ilmu pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup berupa fisik, ekonomi dan sosial seperti memiliki kepercayaan diri, kemampuan menyalurkan aspirasi, memiliki mata pencaharian, mampu berpartisipasi dilingkungan sosial dan mandiri dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif khusus yang menggunakan strategi penelitian kepustakaan. Penelitian yang menggunakan sumber tertulis, seperti buku, catatan, atau sumber akademis lainnya, dikenal dengan penelitian sastra. Pengumpulan data penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wacana dalam buku, makalah, jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dicari informasi yang berkaitan dengan subjek yang sedang dibahas. Analisis isi adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pondok Kelapa dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dengan berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis, untuk mendapatkan alternatif alternatif yang merupakan rumusan rencana strategi pemberdayaan nelayan yang tepat dilakukan dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Analisis matriks SWOT dimaksudkan untuk mencermati setiap perubahan baik pada faktor internal dan faktor eksternal sehingga dapat diminimalisir kelemahan yang ada dan memanfaatkan peluang yang akan dijadikan landasan strategi pemberdayaan nelayan, Berdasarkan analisis IFAS dan EFAS dirumuskan alternatif strategi pemberdayaan nelayan Desa Pondok Kelapa dengan menggunakan analisis matriks SWOT, seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Analisis Matrik SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p>  <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar nelayan berusia produktif 2. Pengalaman kerja yang tinggi 3. Kualitas perairan laut yang masih bagus (potensi perikanan laut masih <i>underfishing</i>) 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Tingkat pendidikan rendah 3. Jiwa kewirausahaan masih rendah 4. Kelembagaan belum optimal 5. Rendahnya posisi tawar pada pedagang, 6. Tidak terdapat TPI (Tempat Pelelangan Ikan).
<p>PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi untuk mengembangkan usaha perikanan 2. Wilayah kawasan penangkapan dekat dan luas, 3. Tersedia teknologi penangkapan, budidaya dan pengolahan, 4. Transportasi dan informasi yang semakin berkembang, 5. Makin banyaknya program pemerintah yang mendukung peningkatan perekonomian pesisir 6. Permintaan pasar produk perikanan laut semakin meningkat 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktivitas nelayan dalam pengembangan usaha dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, 2. Mengoptimalkan jaringan transportasi dan informasi untuk pengembangan pemasaran, 3. Memberdayakan nelayan agar dapat memanfaatkan program-program ekonomi produktif 	<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan teknologi usaha perikanan, (W1 dan O1,O3) 2. Penguasaan teknologi tepat guna,(W2 dan O3) 3. Mengembangkan deversifikasi usaha perikanan,(W3 dan O1,O3,O5) 4. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan,(W5,W6 dan O4,O5) 5. Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir,(W4 dan O1,O6).

Tabel 3 Analisis Matrik SWOT (Lanjutan).

ANCAMAN (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Faktor musim (badai) yang tidak bisa diprediksi, 2. Harga bahan bakar minyak tinggi, 3. Metode penangkapan yang destruktif dari nelayan luar mengancam keseimbangan ekosistem laut, 4. Pedagang (pengepul) memegang peran penentu harga	1. Menerapkan teknologi perikanan modern supaya nelayan tetap produktif sepanjang tahun 2. Memanfaatkan transportasi dan informasi untuk pengembangan pasar dan menaikkan harga	1. Meningkatkan sumber daya manusia nelayan 2. Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan untuk pengembangan usaha dan perdagangan 3. Memanfaatkan teknologi tepat guna dalam rangka efisiensi

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Hasil analisis SWOT telah dirumuskan delapan alternatif rumusan strategi pemberdayaan nelayan Desa Pondok Kelapa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Dapat disimpulkan strategi yang diambil dengan menggunakan **Strategi WO** yaitu **Meminimalkan Kelemahan Untuk Memanfaatkan Peluang**. Adapun strategi pemberdayaan nelayan Desa Pondok Kelapa yang diterapkan adalah:

1. Pengembangan teknologi usaha perikanan;
2. Penguasaan teknologi tepat guna;
3. Mengembangkan deversifikasi usaha perikanan;
4. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan;
5. Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir.

Strategi Utama Pemberdayaan Nelayan

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas terhadap aspek sumberdaya perikanan, sosial-budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan nelayan Desa Pondok Kelapa diperoleh: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Peluang dan kekuatan harus tetap dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang menjadi faktor penghambat program pemberdayaan nelayan. Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh rumusan strategi pemberdayaan nelayan sebagai berikut:

1. **Penguasaan Teknologi Usaha Perikanan.** Untuk mendorong pengembangan teknologi usaha perikanan yaitu motorisasi perahu, pengembangan unit penangkapan serta pengembangan budidaya ikan. Pengembangan teknologi merupakan perbaikan kapasitas kinerja operasional penangkapan ikan, meningkatkan daya jangkau melaut, bertambahnya upaya penangkapan (jumlah trip) dan hasil tangkapan menjadi meningkat pada umumnya jenis teknologi penangkapan ikan yang digunakan nelayan adalah pancing dan jaring. Untuk jenis kapal/perahu penangkapan ikan yang digunakan adalah perahu tanpa motor/perahu layar dan perahu motor tempel dengan ukuran dibawah 5 GT (tergolong skala kecil) dengan teknologi yang masih sederhana. Program pemerintah tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat

bagi kelompok nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir dan laut.

2. **Pengembangan Penguasaan Teknologi Tepat Guna.** Strategi prioritas kedua adalah pengembangan penguasaan teknologi tepat guna. Secara umum teknologi yang digunakan nelayan di Desa Pondok Kelapa masih sederhana oleh sebab itu produktivitas rendah dan menyebabkan pendapatan mereka menjadi rendah. Upaya meningkatkan pendapatan nelayan dilakukan melalui penguasaan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi. Namun demikian upaya pemberdayaan nelayan melalui penguasaan teknologi tepat guna harus selalu mempertimbangkan sifat, karakteristik, kemampuan dan kesiapan masyarakat nelayan agar implemetasi teknologi dapat berkelanjutan. Pemberdayaan nelayan melalui pengembangan teknologi tepat guna harus terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan nelayan, baik dari segi kapasitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya mereka. Modernisasi alat dan kapal penangkapan ikan harus dibarengi dengan peran dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga yang terkait dengan kepentingan usaha penangkapan, karena kondisi yang tidak dipantau akan mengakibatkan penutunan sumberdaya diperairan.
3. **Mengembangkan Deversifikasi Usaha Perikanan.** Strategi ketiga adalah pengembangan diversifikasi usaha perikanan pengolahan ikan, budidaya ikan keramba, penanaman rumput laut dan rumponisasi. Kegiatan diversifikasi yang telah dilakukan oleh nelayan di Desa Pondok Kelapa baru pengolahan ikan yaitu: pengeringan ikan dan teri. Kegiatan pengeringan ikan dan teri tergantung dari perolehan ikan atau pada saat ikan lagi musim ikan banyak sehingga harga menjadi murah atau ikan yang tidak terjual. Strategi pengembangan pengolahan ikan ini perlu terus ditingkatkan sebagai nilai tambah bagi pengasilan masyarakat pesisir dan nelayan serta mampu menyerap hasil tangkapan nelayan dan sebagai pekerjaan tambahan nelayan dan keluarganya pada saat tidak melaut. Dengan perkembangan teknologi dan armada penangkapan ikan di masa depan tentunya perlu penyerapan hasil tangkapan baik dalam bentuk ikan segar dan bahan baku pengolahan ikan. Selain itu, pengembangan diversifikasi pengolahan ikan ini akan memiliki dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian di kawasan pesisir. Namun demikian, untuk pengembangan strategi ini perlu di dukung oleh berbagai instansi terkait berupa pembinaan, pelatihan, pemberian modal dan akses pasar.
4. **Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Usaha Perikanan.** Pembangunan sarana prasarana usaha merupakan keharusan dari kegiatan atau usaha yang dapat menunjang keberhasilan. Ketersediaan sarana prasarana pendukung sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha perikanan. Alternatif strategi kebijakan ini merupakan solusi terhadap masih minimnya sarana prasarana penunjang usaha perikanan seperti tambatan perahu, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), mahalnya harga Bahan bakar Minyak (BBM). Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya operasional dan akhirnya harga ikan menjadi rendah. Semua permasalahan tersebut telah menyebabkan tergangunya aktivitas usaha perikanan sehingga pada akhirnya berujung pada penurunan pendapatan nelayan. Atas dasar kenyataan itu, pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan nelayan, perlu memprioritaskan pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan tangkap diantaranya yaitu pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pabrik es di tempat-tempat yang masih mengalami kekurangan sarana prasarana tersebut. Pembangunan *cold storage* dan pabrik es di dekat sentra-sentra usaha perikanan tangkap dapat menunjang meningkatkan kualitas produksi ikan, jika mutu ikan baik maka akan meningkatkan harga ikan dan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.
5. **Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir.** Strategi kelima strategi pemberdayaan nelayan adalah penguatan kelembagaan masyarakat pesisir. Upaya membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat pemanfaat

(KMP) dan kelompok usaha bersama (KUB) ditingkat desa serta membangun koperasi. Melalui kelembagaan masyarakat yang ada diharapkan mampu meningkatkan status sosial dan ekonomi, serta sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bukan sesuatu yang mudah bagi kelompok masyarakat pesisir yang memiliki berbagai keterbatasan. Penekanan terhadap penguatan kelompok masyarakat dan koperasi ini, didasarkan pada kelemahan pada pasca program yang kurang mendapat perhatian dan kelanjutan program kegiatan. Oleh karena itu, untuk menumbuh kembangkan tatanan kelembagaan masyarakat pesisir perlu penguatan kapasitas kelembagaan secara sistematis dan terus menerus. Dengan penguatan kelompok nelayan akan mempermudah mereka untuk mengakses sumberdaya yang dibutuhkan dan memiliki posisi tawar atau setara dengan pihak lain yang terlibat di dalam setiap aktivitas atau berhubungan dengan mereka. Begitu juga penguatan lembaga ini dapat berdaya dan memainkan peran dan fungsinya sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi di kawasan pesisir. Bentuk penguatan kelembagaan masyarakat pesisir dan nelayan ini dapat berupa pembinaan, pendampingan dan pelatihan dari berbagai instansi terkait. Kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir dan nelayan ini merupakan bagian dari peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir dan nelayan, serta manajemen usaha perikanan. Hal terpenting dari kegiatan ini adalah mendorong modal sosial masyarakat pesisir agar lebih berdaya dan mandiri dalam menggerakkan aktivitas perekonomiannya. Pembinaan dan pelatihan diharapkan dapat menjadi *trigger* (pemicu) agar tumbuh dan kembangnya inovasi usaha perikanan sehingga tidak hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah semata, tetapi potensi sosial ekonomi yang ada dapat ditumbuh-kembangkan dalam mendukung pengembangan usaha perikanan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Pondok Kelapa disebabkan beberapa hal diantaranya: 1). Faktor sumberdaya manusia, 2). Faktor ekonomi dan 3). Faktor kelembagaan. Rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh nelayan ini ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterampilan lain dan tidak mempunyai pekerjaan alternatif lain selain sebagai nelayan. Lemahnya ekonomi nelayan ditandai dengan masih sederhana teknologi alat tangkap yang dimiliki mengakibatkan pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Lemahnya kelembagaan ditandai dengan belum optimalnya lembaga yang ada untuk menjaankan fungsi dan perannya dalam peningkatan ekonomi nelayan.
2. Strategi pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di Desa Pondok Kelapa dilakukan dengan 1). Pengembangan teknologi usaha perikanan, 2). Penguasaan teknologi tepat guna, 3). Mengembangkan deversifikasi usaha perikanan, 4). Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, dan 5). Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir. Pengembangan teknologi dilakukan untuk memperbaiki kinerja operasional penangkapan, meningkatkan daya jangkau melaut, bertambahnya upaya penangkapan (jumlah trip) dan hasil tangkapan menjadi meningkat. Penguasaan teknologi tepat guna suatu upaya meningkatkan pendapatan nelayan dengan mempertimbangkan sifat, karakteristik, kemampuan dan kesiapan nelayan. Usaha diversifikasi usaha perikanan dilakukan untuk mendorong perekonomian masyarakat pesisir dan nelayan dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi produktif. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang seperti tambatan perahu, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tempat pengisian Bahan bakar Minyak (BBM) khusus nelayan. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan terus menerus agar mempermudah nelayan mengakses sumberdaya yang dibutuhkan, penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembinaan, pendampingan dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia, 2006. "Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" The World Bank. Gradasi Aksara.
- Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah. 2011. "Profil Bengkulu Tengah (Bengkulu Tengah Dalam Angka)". Bengkulu Tengah.
- Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah. 2012. "Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah 2012-2032". Bengkulu Tengah.
- BPS (2009) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keperlahan Kemiskinan Menurut Provinsi.
- Dault, A. 2008. "Pemuda Dan Kelautan". Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003. "Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir." Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2002. "Data Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) PEMP TA 2002". Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
- Hikmat, A. 2006. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat." Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi, dkk. 2007. "Strategi Hidup Masyarakat Nelayan". Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Kusnadi, 2003. "Akar Kemiskinan Nelayan". Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Kusnadi, 2007. "Jaminan Sosial Nelayan". Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Kusnadi. 2009. "Keberadaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir". Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Kuncoro, Mudrajat. 2006. "Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah dan Kebijakan", edisi keempat, UPP. STIMYKPN 2006
- Mulyadi, S. 2007. "Ekonomi Kelautan". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- McArdle, John J. 1989. "Community Development Tools of Trade". Community Quarterly Journal.
- Nazir, M. 2005. "Metode Penelitian." Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nikijuluw, PHV. 2002. "Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan". P3R. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Kecamatan Pondok Kelapa Tahun 2012. "Profil Kecamatan Pondok Kelapa (RPIJM Desa Pondok Kelapa 2012). Kecamatan Pondok Kelapa.
- Rangkuti, F. 2009. "Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rianse, A. 2000. "Kajian Pemberdayaan Nelayan". Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
- Suharto, E. 2005. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat". Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono, 2006. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Ed ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, M dan Efendi S. 1995. "Metode Penelitian Survei". Jakarta: LP3ES.
- Soekartawi, 1986. "Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian". Jakarta: Rajawali.
- Sumodiningrat, G. 1999. "Pemberdayaan Masyarakat dan JPS". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zohra, F. 2008. "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga". Universitas Sumatera Utara